



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/18466/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I
(RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KUNTA WIBAWA
DASA NUGRAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/0807/2009 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Departemen Kesehatan yang Berlokasi di Komplek RSUP Fatmawati Jakarta, Komplek Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak Jakarta, dan Komplek Perkantoran Badan PPSDM Kesehatan Jakarta, Rumah Negara yang berlokasi di Komplek Badan PPSDM Kesehatan Jalan Hang Jebat III (Kiri), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan);
 - b. bahwa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I

(Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada
Kunta Wibawa Dasa Nugraha;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

- 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/0807/2009 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Departemen Kesehatan yang Berlokasi di Komplek RSUP Fatmawati Jakarta, Komplek Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak Jakarta, dan Komplek Perkantoran Badan PPSDM Kesehatan Jakarta;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Komplek Badan PPSDM Kesehatan Jalan Hang Jebat III (Kiri), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Golongan dan Kelas/Tipe : I (Jabatan) / 260 m²

Untuk Ditempati : Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Pangkat/Gaji Pokok : Pembina Utama Madya, IV/d, Rp4.763.200,00

Terhitung mulai : 28 Juli 2021

Uang sewa per bulan : Rp242.000,00

KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2021, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan ketentuan Penghunan Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) yang telah ditandatangani di atas meterai dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunan yang diberikan kepadanya dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin

tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

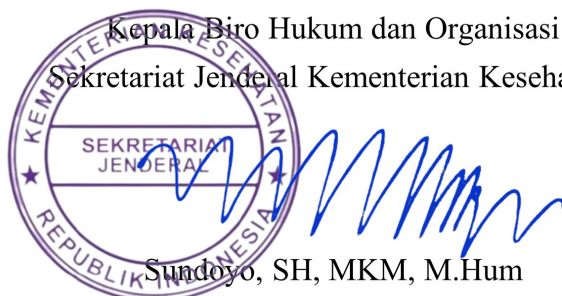
Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Bina Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
6. Plt. Kepala Biro Umum
7. Kepala Biro Kepegawaian
8. Bendahara/pembuat Daftar gaji Sekretariat Jenderal

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Health, Secretariat General. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KESEHATAN' at the top, 'SEKRETARIAT JENDERAL' in the center, and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002